

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1 IKHTISAR TEMUAN**

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa tingkat penerapan bantuan pendidikan yang USAID untuk Indonesia dalam program *Decentralizing Basic Education* tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pemahaman budaya demokrasi bagi siswa-siswi responden sekolah binaan DBE dan non-DBE di Kota Bogor. Faktor keberadaan “etos lama” menjadi faktor penentu ketiadaan hubungan meskipun tingkat “habitus demokrasi” dan “prinsip deliberasi” telah memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat penerapan bantuan. Sementara itu, secara kumulatif juga tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemahaman budaya demokrasi antara sekolah yang dibantu dengan yang tidak dibantu. Dengan demikian, kekuasaan produktif Amerika dalam program bantuan *President Bush’s Indonesia Education Initiative* tidak berhasil mempengaruhi tumbuhnya pemahaman akan budaya demokrasi yang lebih baik dalam upaya mendukung transisi demokrasi di Indonesia.

Kegagalan ini terkait dengan fitur neokonservatisme (yang berjalanan dengan neoliberalisme) yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Dalam isu pendidikan, neokonservatisme yang berangkat dari gagasan privatisasi dan desentralisasi, mengutamakan perhatian kepada masalah pembiayaan, tata kelola sekolah, *national curricula*, dan upaya melatih guru. Fitur ini paralel dengan teori Modernisasi yang menjadi legitimasi utama dalam upaya pemberian bantuan pendidikan bagi demokrasi yang mengandalkan asumsi linier peran pendidikan dalam menciptakan sofistikasi, kemudian mempromosikan norma, dan meningkatkan legitimasi terhadap demokrasi yang selanjutnya menjamin pembangunan demokratik dalam pembangunan politik. Fitur modernisasi inilah yang menjadi gagasan dasar dalam pemberian bantuan pendidikan yang

merupakan bagian dari strategi pembangunan dalam pilar keamanan nasional AS pasca-9/11.

Corak neokonservatisme tersebut pada gilirannya hanya menambahkan program DBE dalam ketidakjelasan arah pembangunan pendidikan Indonesia yang selanjutnya juga tidak berhasil memberikan “*toolkit*” yang dapat diadopsi oleh generasi muda Indonesia. Akibat dominannya pandangan neokonservatisme, upaya menghadirkan “*toolkit*” gagal dilakukan karena secara substansial metode PAKEM yang dipromosikan dalam program DBE semata-mata mengambil “cara Indonesia” dengan kendala struktural *national curricula* yang menghalangi sekolah mengadopsi dan memberi makna yang lebih baik terhadap praktik-praktik demokratis seperti diskusi dan mengadopsi kurikulum non-teknis yang dapat lebih melatih siswa mengelola ketidaksepakatan.

Alih-alih demokratisasi, pemberian bantuan ini merupakan “liberalisasi” karena tidak menaruh perhatian secara serius untuk meningkatkan kapasitas publik di dunia untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Uji hipotesa menunjukkan bagaimana etos lama masih mengendalam dalam proses demokratisasi. Sementara itu, pemberi donor tidak menaruh perhatian yang serius kepada upaya mencari “*toolkit*” secara mutakhir. Hal ini pada gilirannya bukan merupakan jawaban dari permasalahan kultural di Indonesia karena pihak-pihak dengan identitas berbeda dan tujuan berbeda tidak mencapai rekonsiliasi dan akan mencari jalan sesuatu sesuai dengan hasratnya masing-masing.

Telah jelas bahwa kealpaan neokonservatif yang menjadi corak implementasi bantuan ini mendorong perhatian tertentu dan luput memperhatikan aspek penting di dalam demokratisasi yang seharusnya diupayakan tercapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang tengah dipromosikan. Penelitian ini berargumen bahwa kelemahan ini paralel dengan kelemahan teori modernisasi karena bagaimanapun juga asumsi demokratisasi yang melegitimasi ini amat mengetengahkan gagasan dasar tentang pengaruh linier pendidikan dalam pembangunan politik. Dalam keadaan seperti ini, subyek yang terlibat mungkin

mengklaim kepada dirinya sendiri “kekuatan untuk *me-remake* tatanan dunia dalam cara-cara yang justru tidak berhubungan dengan partisipasi demokratis”.<sup>294</sup>

## 6.2 KONSTRUKTIVISME DAN LIBERALISME

Penelitian ini pada bagian pendahuluan dikatakan beranjak dari paradigma konstruktivisme. Namun pada bagian ini, dengan pemakaian teori Barnett dan Duvall tentang kemungkinan manifestasi kuasa imperial dari bentuk kekuasaan produktif, penelitian akan lebih jauh menawarkan argumen bahwa paradigma konstruktivisme harus memperhatikan bentuk-bentuk *power* yang jamak dalam upayanya menjelaskan “perubahan” semisal dalam teori “siklus hidup norma”.

Bagi kalangan konstruktivis, struktur dalam hubungan internasional ditentukan oleh distribusi gagasan, yaitu gagasan bersama, harapan, dan kepercayaan tentang perilaku yang tepat (*appropriate*) membentuk struktur dan tatanan. Dengan demikian yang akan merubah tatanan adalah distribusi gagasan itu sendiri. Promosi norma melalui “siklus hidup norma” akan membuat perubahan berdasarkan tahapan kemunculan, *cascade*, dan internalisasi.<sup>295</sup>

Dalam mengkonseptualisasikan hubungan *co-constituting* antara agen dengan struktur, konstruktivis mengartikulasikan “suatu proses iteratif di mana agen-agen secara konstan meredefinisi norma melalui praktik pada saat yang bersamaan ketika mereka dibatasi dan direkonstitusi oleh struktur sosial.”<sup>296</sup> Dalam keadaan seperti ini Klotz dan Lynch mengakui adanya faktor internasional yang secara kuat dapat berpengaruh kepada perubahan politik di tingkat domestik melalui *empowerment* aktor dengan menyandingkan norma-norma baru dalam kehidupannya.<sup>297</sup>

Upaya mempengaruhi perubahan dengan promosi norma oleh AS melalui USAID dapat dikatakan merupakan bentuk “*strategic social construction*” yang diindikasikan oleh upaya AS secara rasional sedemikian rupa dengan perhitungan *means-ends* untuk mencapai tujuan dalam rangka mempengaruhi *shared*

<sup>294</sup> Himadeep Muppidi, “Colonial and Postcolonial Global Governance,” dalam *Power in Global Governance*, ed. Michael N. Barnett dan Raymond Duvall (New York: Cambridge University Press), 282.

<sup>295</sup> Finnemore dan Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change.”

<sup>296</sup> Audie Klotz dan Cecilia Lynch, “Conflicted Constructivism: Positivism Leanings vs Interpretivist Meanings,” (manuskrip tidak dipublikasikan, 1998), 14

<sup>297</sup> *Ibid.*, 16.

*knowlegde* di Indonesia dalam kasus pendidikan.<sup>298</sup> Dalam hal ini, upaya tersebut bisa jadi dinilai sebagai upaya mencapai tujuan dengan cara mengubah fungsi utilitas subyek atas nilai dalam cara yang menunjukkan komitmen normatif dari AS sendiri.<sup>299</sup> Permasalahannya adalah, alih-alih *power*, dalam upaya promosi norma ini, *norm entrepreneur* akan selalu dinilai mendapatkan sumber motivasinya dengan referensi “empati, altruisme, dan komitmen ideasional”<sup>300</sup> Kalangan konstruktivisme tidak memisahkan dengan ketat “norma”, “identitas” dan “kepentingan”. Namun mereka cenderung menganggap *power* di luar itu semua. Pengecualian darinya adalah argumen yang mengindikasikan bahwa pembangunan norma dalam suatu masyarakat menunjukkan aktivitas yang “mengidentifikasi dan memanipulasi instrumen kekuasaan untuk membentuk kehidupan kolektif”.<sup>301</sup>

Bagi Andrew Hurrel, dari sudut pandang negara Dunia Ketiga atau negara berkembang, teori-teori HI telah mengesampingkan permasalahan kekuasaan dalam pandangan yang apolitis.<sup>302</sup> Kalangan konstruktivis seperti John Gerard Ruggie cenderung menganggap bahwa *power* dengan “*legitimate social purpose*” dianggap dua hal yang berbeda yang sama-sama mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika.<sup>303</sup> Ruggie percaya bahwa “*legitimate social purpose*” membentuk *content* dari tatanan internasional, alih-alih *power*.<sup>304</sup> Beberapa kalangan konstruktivis dapat dikatakan percaya bahwa norma-norma Barat yang mengenai isu-isu yang kongruen dengan liberalisme dan kapitalisme lebih mungkin menjadi unggul dan menyebar.<sup>305</sup> Bagi Adler, hal ini dapat mengarah bahwa perdebatan konstruktivis ke depan boleh jadi berkisar pada hal seputar “membuat Liberalisme lebih kompatibel dengan konstruktivisme tanpa melemahkan basis meta-teori

<sup>298</sup> Finnemore dan Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” 910.

<sup>299</sup> Ibid.

<sup>300</sup> Ibid., 898-899.

<sup>301</sup> Audie Klotz and Cecilia Lynch, “Conflicted Constructivism”, 23. Lihat juga Paul Wapner, “Politics Beyond the State: Environmental Activism and World Civic Politics,” *World Politics* 47, no. 3 (1995): 312 dan 315.

<sup>302</sup> Andrew Hurrel, “Power, Institutions, and the Production of Inequality,” dalam *Power in Global Governance*, ed. Michael N. Barnett dan Raymond Duvall (New York: Cambridge University Press), 33.

<sup>303</sup> Finnemore dan Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” 887.

<sup>304</sup> John Gerard Ruggie, “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order,” *International Organization* 36, no. 2 (1982): 382.

<sup>305</sup> Finnemore dan Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” 906-907.

yang sebelumnya”.<sup>306</sup> Padahal, agenda Liberal yang diikuti oleh konstruktivisme ini harus memperhatikan “kenyataan yang bisa jadi mengambil bentuk yang lain di Dunia Ketiga, budayanya, masalah-masalahnya, dan agendanya, yang sering kali tidaklah Liberal dan bahkan anti-Liberal”.<sup>307</sup>

Walaupun kalangan konstruktivisme telah menekankan bagaimana struktur normatif yang melingkupi aktor-aktor membentuk identitas dan kepentingannya, mereka jarang memperlakukan struktur normatif ini sebagai sesuatu yang terdefiniskan dan terisi oleh kekuasaan, atau menekankan bagaimana efek-efek konstitutif juga merupakan ekspresi kekuasaan.<sup>308</sup> Dalam hal ini, adalah pandangan Liberalisme yang terkait dalam aplikasi Modernisasi yang sebetulnya menjadi sumber kuasa yang membentuk kemampuan aktor untuk mengendalikan nasibnya sendiri dalam hubungan sosial yang menyebar dan bersifat konstitutif.

Konstruktivisme dapat dinilai memiliki akar dari pemikiran Kant karena melandasi pemikiran dari pemaknaan dunia material berdasarkan “*consciousness*”, atau membawa dari “*nature*” ke “*culture*”.<sup>309</sup> Konstruktivisme menekankan kepada “*intersubjective nature*” dari pengetahuan sehari-hari (*everyday knowledge*).<sup>310</sup> Sementara itu, asumsi Kant mengindikasikan bahwa “proses modernisasi menempatkan tradisi dan modernitas sebagai titik-titik ujung dalam sebuah kontinum; modernisasi adalah setiap pergerakan di dalam kontinum tersebut.”<sup>311</sup> Senjang kuasa yang alpa diperhatikan oleh kalangan neokonservatif sehingga memungkinkan asumsi imperial muncul dalam kasus bantuan pendidikan ini muncul dari anggapan modernitas tersebut.

Sementara itu, Teori Modernisasi – yang lahir sejak dekade 1950an dengan ditandai lahirnya satu generasi baru ilmuwan politik, ekonomi, dan para ahli sosiologi, psikologi, antropologi, serta ahli kependudukan dan menjadi “industri segar” sampai pertengahan tahun 1960an – memberikan legitimasi

<sup>306</sup> Adler, “Constructivism and International Relations,” 109.

<sup>307</sup> Ibid.

<sup>308</sup> Barnett dan Duvall, “Power in International Politics,” 41.

<sup>309</sup> Adler, “Constructivism and International Relations,” 96-97. Lihat juga Ian Hacking, *The Social Construction of What?* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

<sup>310</sup> Adler, “Constructivism and International Relations,” 97.

<sup>311</sup> Nicholas Greenwood Onuf, *The Republican Legacy in International Thought* (New York: Cambridge University Press, 1998), 251

tentang perlunya bantuan asing, khususnya dari Amerika Serikat karena mengasumsikan bahwa keberhasilan negara maju membuat mereka “harus” menjadi mentor bagi negara yang lebih belakangan memulai modernisasinya.<sup>312</sup> Kebanyakan literatur modernisasi dalam pendidikan menteorisasikan modernitas dalam terminologi kategori-kategori biner seperti “modern” *versus* “tradisional”, “Barat” *versus* “non-Barat”, dan “formal” *versus* “informal” dengan memperlakukan sekolah sebagai institusi modernitas untuk mentransformasikan masyarakat menjadi lebih makmur dan lebih pesat pembangunannya.<sup>313</sup>

Dalam disiplin ilmu HI sendiri, perbedaan konsepsi, tradisi, aturan-aturan dan ketiadaan pemerintahan membuat budaya menjadi “*part and parcel*”, mendefinisikan karakter pada subyek yang mulai dibahas. Disiplin HI cenderung lebih nyaman kepada homogenitas alih-alih pada isu *diversity* sejak keberadaan pemerintahan menempati unit analisa penting dan primer dalam studi HI. Aspek budaya yang sering kali dirujuk lebih condong kepada *human nature*, yang merupakan “*level beneath that of culture*”.<sup>314</sup> Dalam keadaan seperti ini, budaya cenderung dipakai dengan penggunaannya mem-*bypass* kekuatan eksplanasi dalam menjelaskan interaksi pada politik global.

Padahal dalam praksis, *state of nature* juga menjadi permasalahan. Basis kepercayaan Amerika membentuklah dasar asumsi ontologis mengenai masyarakat yang dengannya mereka berhubungan atau terlibat yang berlaku universal. Dalam hal ini universalitas diterapkan dalam bentuk modernitas. Akibatnya adalah terbentuk perbedaan-perbedaan yang bersifat dapat diterangkan. Hal ini membuat pada level praksis di luar hal yang terbayangkan dalam bentuk

---

<sup>312</sup> Suwarsono dan Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1991), 7-26. Lihat juga Gabriel Almond, “The Development of Political Development,” dalam *Understanding Political Development*, ed. Myron Weiner dan Samuel Huntington (Boston: Little Brown & Co., 1987), 437-490; Daniel Chirot, “Changing Fashions in the Study of Social Cause of Economics and Political Change,” dalam *The State of Sociology*, ed. James Short (Beverly Hills: Sage, 1981), dan David Apter, *Rethinking Development: Modernization, Dependency, and Post Modern* (Newbury Park: Sage Publications, 1987), 259-282.

<sup>313</sup> Amy Stambach, “African Education, Culture, and Modernity Unwound,” *Comparative Education Review* 50, no. 2 (2006): 290-291.

<sup>314</sup> Beate Jahn, “The Power of Culture in International Relations,” dalam *Culture and International History*, diedit oleh Jessica C.E. Gienow-Hecht dan Frank Schumacher (New York: Berghahn Books, 2003), 28.

aspek keberadaan pemerintahan, muncul “budaya yang salah” atas dasar *laws of nature* yang tidak sesuai.<sup>315</sup>

Sejarah menunjukkan ketika bangsa Eropa mengalami *first encounter* dengan bangsa Indian di Amerika, seperti ditulis oleh Jahn mengenai kasus Spaniards thd Amerindian, Jahn menulis:

*State building and the introduction of private property are depicted as the solutions to this dilemma: setting up a superior power ensured peace between the members of the community; and the introduction of private property in land and its guarantee by the laws not only put an end to the fight over common resources but also provided the necessary conditions for intensive agriculture and, thus, an increase in production. Again, state building and private property represent reason for this developmental stage.*<sup>316</sup>

[Pembangunan negara dan pengenalan kepada kepemilikan swasta digambarkan sebagai solusi kepada dilema ini: perancangan suatu kekuasaan superior yang memastikan perdamaian antara anggota-anggota kelompok dalam komunitas; dan pengenalan kepemilikan swasta dalam lahan dan penjaminannya oleh hukum, tidak hanya menempatkan akhir kepada pertengkaran atas sumber-sumber daya umum namun juga menyediakan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk pertanian intensif dan, dengan demikian, meningkatkan produksi. Dengan demikian lagi, pembangunan negara dan kepemilikan swasta menampilkan alasan (*reason*) bagi tahap pembangunan ini.]

Signifikansi teoritis dalam penelitian ini mengangkat bukti empiris bilamana *superpower* AS berupaya untuk “mengajarkan” masyarakat Indonesia pasca-terorisme 9/11 untuk untuk “*following the nature*” guna mencapai

---

<sup>315</sup> Ibid.

<sup>316</sup> Ibid., 30.

subyektifitas demokratis, rasional, *civil*, dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah praksis yang demikian telah mereifikasi terminologi masalah budaya tanpa secara berarti memecahkannya. Kebangkitan asumsi modernitas oleh upaya kebijakan pembangunan yang muncul dalam pemerintahan Bush dalam era neokonservatif menunjukkan adanya reifikasi tersebut. Akibatnya kelemahan teori modernitas untuk mengarahkan penjelasan bagaimana “politik demokrasi” terbentuk melalui pilar pendidikan hanya akan menambah rumit masalah budaya pada level praksis, khususnya di Indonesia.

Dianggap tertinggal dalam fase pembangunan sedemikian rupa, permasalahan budaya yang menjadi konteks bagi hubungan Indonesia-Amerika berupaya diinterpretasikan kembali ke dalam masalah *developmental*. Sementara itu, kekuasaan produktif AS yang terpancar dalam program bantuan ini menunjukkan apa yang disebut oleh Jahn sebagai “authority of examples”. *Law of Nature* yang dijadikan pedoman mereifikasi kebutuhan untuk menjelaskan tahapan masyarakat berkembang dari satu fase kepada fase lainnya dalam alur linear. Dalam hal tersebut, diupayakan bahwa “demokratis” sebagai “state of nature” akan terbentuk. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah ketakutan terhadap “*seam states*” – negara yang secara potensial menjadi akses bagi kelompok ekstrim untuk memberikan ancaman kepada negara-negara yang berfungsi dalam lingkaran globalisasi – membangkitkan kembali teori modernisasi dalam tujuan “menegakan demokrasi” demi keamanan nasional AS. Hal tersebut terjadi alih-alih upaya jenius untuk memisahkan potongan-potongan yang baik dari yang buruk dan menghasilkan solusi yang tersaring yang memuat potongan-potongan yang baik yang terinsulasi dari yang buruk. Secara ontologi AS memandang Indonesia sebagai “Muslim Moderat”.

Pandangan ontologis yang demikian menafikan budaya, sementara *ontological position* itu tidak teruji: tidak dapat dibuktikan maupun tidak dapat ditolak. Mempersamakan Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam membuat Indonesia bagi AS menjadi negara Muslim Moderat sehingga fokus strategi pembangunan mengarah kepada pendidikan, seperti juga diberikan kepada negara-negara Muslim lainnya. Dalam kondisi disparitas dalam kemakmuran dan kekuasaan antara negara donor dan penerima bercampur dengan ketakutan akan



“*seam states*” membuat kedua belah pihak yang terlibat, dari Indonesia dan Amerika yakin bahwa prosedur dan kebijakan telah ditempuh adalah benar. Dalam hal ini tema-tema diskursif dan praktik-praktik kultural tertentu dapat diambil sebagian orang-orang sebagai milik mereka. Mereka mungkin percaya itu benar, alih-alih mengejar kekuasaan. Namun, seperti ditulis oleh Bourdieu, “agen-agen tidak pernah mengetahui sepenuhnya bahwa apa yang sedang mereka lakukan lebih bisa dipahami daripada yang mereka ketahui.”<sup>317</sup>

Pada akhirnya alih-alih demokratisasi, liberalisasi dapat menjadi implikasi kentalnya neokonservatisme dan neoliberalisasi, yang menjadi fitur utama pemberian bantuan pendidikan kepada Indonesia. Seperti dinyatakan oleh Zambelis, terdapat perbedaan yang nyata dalam upaya demokratisasi dan liberalisasi.<sup>318</sup> Demokratisasi menandakan gerakan ke arah meningkatnya partisipasi politik dalam sistem pemerintahan dengan esensi meningkatkan kebebasan kolektif rakyat terutama dalam kapabilitas untuk berpartisipasi dan memberikan pengaruh kepada pemerintahan. Sebagai kontras, liberalisasi dapat berarti setiap perubahan yang meningkatkan kebebasan individu dalam hal-hal seperti *press censorship* atau hukum asosiasi publik yang longgar serta skema privatisasi ekonomi secara luas. Argumen yang mengutamakan liberalisasi pasar di atas demokrasi dapat dihubungkan dengan asumsi dasar bahwa sebagai sistem informasi dan insentif, pasar cenderung lebih efisien dibandingkan dengan demokrasi representatif.<sup>319</sup>

Perbedaan utama liberalisasi dengan demokratisasi adalah tidak dihiraukannya kemampuan publik untuk secara langsung berpartisipasi dalam pemerintahan oleh liberalisasi.<sup>320</sup> Masih kentalnya etos lama menunjukkan bahwa alih-alih memusatkan diri untuk melatih siswa dengan “*toolkit*” yang dapat mendorong kemampuan mereka berpartisipasi di masa depan dalam kegiatan politik, bantuan pendidikan dalam program DBE lebih memperhatikan kebijakan organisasi ruang kelas, pembiayaan, dan tata kelola sekolah yang sejalan dengan *national curricula* dalam bentuknya yang *hybrid* dalam pendidikan di Indonesia.

<sup>317</sup> Bourdieu, *The Logic of Practice*, 69.

<sup>318</sup> Chris Zambelis, “The Strategic Implications of Political Liberalization and Democratization in the Middle East,” *Parameters* 35, no. 3, (2005): 90.

<sup>319</sup> Jerry Z. Muller, “The Democratic Threat to Capitalism,” *Daedalus* 136, no. 3 (2007): 77.

<sup>320</sup> *Ibid.*

Pengaruh neoliberal di dalam proyek pendidikan terkait dengan modernitas dilabel oleh Coe sebagai bentuk “dekomposisi neoliberal atas modernitas”<sup>321</sup>

Dengan demikian, liberalisasi dapat dikatakan mungkin mengambil tempat dalam sistem otoritarian tanpa secara berarti mengarah kepada transisi demokrasi. Reformasi *glasnost* dari Mikhail Gorbachev, kebijakan ekonomi pintu terbuka yang dikeluarkan oleh Mesir, Suriah, dan Tunisia, serta keberadaan institusi politik dan ekonomi yang melibatkan banyak partai di sejumlah negara di Timur Tengah seperti Algeria, Bahrain, Mesir, Iran, Yordania, Kuwait, Maroko, Oman, Pakistan, Arab Saudi, Suiran, Tunisia dan Yaman merupakan contoh dimana sistem otoritarian tetap mengikat meski liberalisasi yang berbalut demokrasi dilaksanakan. Dalam konteks liberalisasi yang didukung oleh Bank Dunia melalui program SAP (*Structural Adjustment Programmes*) ditemukan bahwa berdasarkan kajian di 12 negara mencakup Indonesia, Filipina, Malaysia, Kenya, Uganda, Nigeria, Mesir, Yordania, Tunisia, Meksiko, Argentina dan Nikaragua, liberalisasi tidak diikuti oleh demokrasi, alih-alih membuat kerusakan di mana perilaku otoritarian negara semakin meningkat.<sup>322</sup>

### 6.3. PROYEK LIBERAL SEBAGAI SUMBER INTERVENSI

Penelitian ini mengedepankan pesimisme terhadap proyek-proyek liberal. Dalam hal ini mesti diungkap akar ideologis dari sumber praktik demi demokratisasi yang padahal hanya mengejar liberalisasi. Sebagai masyarakat liberal, Amerika akan selalu tidak nyaman berdampingan dengan masyarakat yang non-liberal. Hal ini mendorong munculnya intervensi bagi “*common good*”. Bagi Michael Desch, praktek yang secara potensial justru mengendalik pembangunan hakiki di Negara Berkembang berakar dari kuatnya Liberalisme dalam kebijakan luar negeri AS. Sementara itu, sebelumnya telah diakui oleh Doyle bahwa liberalisme gagal memandu kebijakan di luar “dunia liberal” atau “non-liberal”.<sup>323</sup>

Terdapat tiga aspek yang menjadi sumber kegagalan tersebut menurut Doyle. *Pertama* adalah “*imprudent vehemence*” yang dicirikan oleh kebingungan,

<sup>321</sup> Cati Coe, *Dilemmas of Culture in African Schools: Nationalism, Youth, and the Transformation of Knowledge* (Chicago: University of Chicago Press, 2002), 7.

<sup>322</sup> Lihat Remonda Bensabat Kleinberg dan Janine A. Clark (ed.), *Economic Liberalization, Democratization and Civil Society in Developing World* (New York: St. Martin Press, 2000).

<sup>323</sup> Doyle, “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs,” 323.

*costly crusades* dan *spasmodic imperialism*<sup>324</sup>; kedua adalah “*careless and supine complaisance*”; dan ketiga adalah distribusi pendapatan kepada kalangan miskin yang tidak demikian pada kenyataannya. Liberalisme yang dimaksud disini adalah perangkat nilai-nilai politik yang berdasarkan kombinasi kebebasan individual, kesetaraan kesempatan, pasar bebas, dan keterwakilan politik. Kegagalan Liberal juga muncul dalam kebijakan pembangunan kepada negara non-liberal.

Liberalisme AS dalam strategi pembangunan di Dunia Ketiga dicirikan oleh empat premis yang unik: (1) pembangunan ekonomi dan politik adalah hal yang mudah; (2) semua hal-hal yang baik akan berjalan seiringan (*all good things go together*); (3) radikalisme dan revolusi adalah hal yang buruk; dan (4) demokrasi lebih penting dibandingkan dengan tatanan politik.<sup>325</sup> Hal-hal ini lah yang membuatnya kompatibel dengan asumsi teori Modernisasi yang muncul dalam suasana sarat “*imprudent vehemence*”. Pada gilirannya, Seperti dikutip oleh Desch, Hartz berpendapat bahwa, pada pusatnya, tradisi liberal AS mencakup suatu “kompulsi tirani yang mendalan dan tidak tertulis” yang “menghambat tindakan kreatif di luar negeri dengan cara mengidentifikasi alien (misalnya non-liberal) dengan sifat yang sulit dipahami, dan ia menginsiprasikan histeria di dalam negeri dengan cara menghasilkan kekhawatiran yang diakibatkan oleh hal-hal yang sulit dipahami tadi.”<sup>326</sup>

Seperi telah diulas dalam uraian pada bab-bab sebelumnya, Desch menulis bahwa

*During the two terms, the Bush administration embraced all four of the Liberal tradition's key premises. Consider first the liberal tradition's premise that development is a relatively smooth process. The belief that economic development was a*

<sup>324</sup> Ibid., 324.

<sup>325</sup> Robert A. Packenham, *Liberal America and the Third World: Political Development Ideas in Foreign Aid and Social Science* (Princeton, N.J.,: Princeton University Press, 1973), Bab 3, dikutip dalam Michael C. Desch, “America’s Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overreaction in U.S. Foreign Policy,” dalam *International Security* 32, no. 3 (2007/08): 7-43.

<sup>326</sup> Louis Hartz, *The Liberal Tradition in America* (San Diego: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1955), 12, 285, dikutip dalam Michael C. Desch, “America’s Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overreaction in U.S. Foreign Policy,” dalam *International Security* 32, no. 3 (2007/08): 11.

*benefit that most of the world could enjoy was a staple of the liberal Charles River Development community in late 1950s and early 1960s.<sup>327</sup> The Bush administration shared this optimism, though it preferred to rely more on markets and economic incentives than on state guidance and foreign aid to foster economic development.<sup>328</sup>*

(Selama dua periode, pemerintahan Bush menganut keseluruhan empat premis kunci tradisi liberal. ... Kepercayaan bahwa pembangunan ekonomi adalah keuntungan yang dapat dinikmati seluruh dunia adalah pokok pemikiran komunitas liberal Charles River Development di akhir 1950an dan awal 1960an. Pemerintahan Bush juga menunjukkan optimisme ini, walaupun lebih mengandalkan pasar dan insentif ekonomi ketimbang panduan negara dan bantuan luar negeri untuk mendorong pembangunan ekonomi.)

Paling tidak terdapat dua alasan bagi Desch mengapa tradisi Liberal memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri pemerintahan Bush: *pertama*, kebijakan-kebijakan ini didukung oleh banyak kalangan liberal yang dapat menunjukkan bahwa terdapat konsensus yang lebih luas di antara mereka; dan *kedua*, *rationale* pemerintahan Bush mengikuti alur nalar Liberal, yang mengindikasikan bahwa pandangan terhadap dunia yang demikian membentuk kebijakan AS. Dalam kasus perang Irak, pemerintahan Bush menawarkan “*rationale* berbasis kepentingan di publik (memerangi terorisme dan memusnahkan senjata pemusnah massal) dan menganut *rationale* idealis di belakang layar (menyebarkan demokrasi dan mempromosikan hak asasi

---

<sup>327</sup> Packerham, *Liberal America and the Third World*, 62-63, dikutip dalam Michael C. Desch, “America’s Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overreaction in U.S. Foreign Policy,” dalam *International Security* 32, no. 3 (2007/08): 20.

<sup>328</sup> George W. Bush, *National Security Strategy of United States* (Washington, D.C.: White House, 2002), 17, dikutip dalam Michael C. Desch, “America’s Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overreaction in U.S. Foreign Policy,” dalam *International Security* 32, no. 3 (2007/08): 20.

manusia).”<sup>329</sup> Kalangan neokonservatif membantu menyelenggarakan hal yang berangkat dari sini. Namun, sejak Liberalisme amat dominan dalam memandu kebijakan, kelompok kiri yang secara tradisional diusung oleh kalangan Demokrat akan cenderung melakukan hal serupa kepada entitas “non-liberal”. Akhirnya, gejala imperial akan selalu nampak dalam proyek liberal menyebarkan demokrasi yang alih-alih liberalisasi.

Dalam aplikasi di Indonesia untuk program bantuan pendidikan, jelas Liberalisme berupaya melakukan intervensi melalui pendidikan yang pada akhirnya hanya menegaskan gejala imperial AS atas Indonesia. Demokratisasi bukanlah sesuatu yang dikejar oleh AS karena kekuasaan produktif yang senantiasa menempatkan AS dalam posisi supra membuat liberalisme selalu menjadi sumber utama kebijakan luar negeri AS untuk negara seperti Indonesia. Memperhatikan sejarah operasionalisasi *discourse* pembangunan Liberal di Indonesia, maka perlu diwaspadai bahwa kekuatan imperial yang berupaya senantiasa kembali ditegakkan oleh AS akan memanfaatkan fragmentasi identitas di Indonesia. Akhirnya, pasar lah yang senantiasa menjadi aspek utama dalam benak Amerika sebagai entitas “Liberal”. Konformitas terhadap “pasar” inilah yang membentuk kebijakan bantuan pendidikan AS untuk Indonesia dengan fitur utama neokonservatisme.

---

<sup>329</sup> Desch, “America’s Liberal Illiberalism,” 36.